



BUKU SAKU

PENGURUS KWARNAS GERAKAN PRAMUKA
MASA BAKTI 2018-2023



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
TAHUN 2018

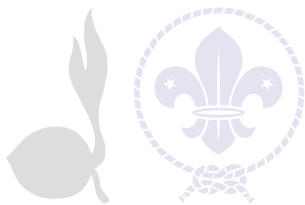
BUKU SAKU

PENGURUS KWARNAS GERAKAN PRAMUKA
MASA BAKTI 2018-2023



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jln. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 350 7645 – Faks. (021) 3507647
Web: www.pramuka.or.id Email: kwarnas@pramuka.or.id





BIODATA

Nama (*lengkap dengan gelar*) :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan/ Penugasan Annas :

Nomor HP :

E-mail :

Telepon dan Faks. Rumah :

Alamat Rumah :

.....

Status Perkawinan : Kawin/ Tidak Kawin

Jumlah Anak:

Nama Istri/Suami :

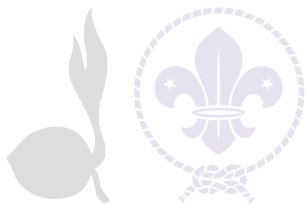
Jabatan di luar Gerakan Pramuka :

Nama dan Alamat Kantor :

.....

Telepon dan Faks. Kantor :

Jakarta,2018



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI 2018-2023

Assalamu'alaikum Wr Wb

Salam Pramuka,

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepengurusan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023 telah tersusun sesuai dengan amanat Munas Gerakan Pramuka Tahun 2018.



Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023 mengemban tugas mulia bagi bangsa dan negara dalam membangun dan membentuk karakter serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kaum muda Indonesia guna menerima estafet kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Penugasan ini tidak akan berhasil tanpa kerja keras, cerdas, dan ikhlas serta dukungan dari seluruh mitra Gerakan Pramuka untuk saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

Dengan semangat “Dasa Karya Gerakan Pramuka” yang mengusung platform “Bangga Pramuka, Bangga Indonesia” harus digulirkan terus menerus dengan penuh **Komitmen, Konsekuen, dan Konsisten** yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 disertai semangat Bela Negara guna menguatkan eksistensi Gerakan Pramuka yang handal dan sebagai pilihan generasi muda Indonesia di era globalisasi dan revolusi industri.

Dengan Moto “**Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan**” dan sebagai dasar pembekalan, kami berharap buku saku yang di antaranya memuat secara singkat Dasa Karya Gerakan Pramuka,

intisari Renstra 2019-2024 serta organisasi dan tatakerja Kwarnas dapat menjadi pedoman kerja bagi kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Selamat bekerja.

Jakarta, Desember 2018
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso



PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



KODE KEHORMATAN PRAMUKA

1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Darma.
3. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya:

a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan Dwidarma.

Dwisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga.
- setiap hari berbuat kebaikan.

Dwidarma

1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya.
2. Siaga berani dan tidak putus asa.

b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma.

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila.
2. Menolong sesama hidup dan memper-siapkan diri membangun masyarakat.
3. Menepati Dasadarma.

Dasadarma

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3. Patriot yang sopan dan kesatria.
4. Patuh dan suka bermusyawarah.
5. Rela menolong dan tabah.
6. Rajin, terampil, dan gembira.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
8. Disiplin, berani, dan setia
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

- c. **Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa Gerakan Pramuka terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa Gerakan Pramuka, dan Dasadarma.**

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila.
2. Menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat.
3. Menepati Dasadarma.

Dasadarma

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3. Patriot yang sopan dan kesatria.
4. Patuh dan suka bermusyawarah.
5. Rela menolong dan tabah.
6. Rajin, terampil, dan gembira.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
8. Disiplin, berani, dan setia.
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.



HIMNE GERAKAN PRAMUKA

adalah lagu Satyadarma Pramuka ciptaan Husein Mutahar, syair lagunya berbunyi:

*Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila
Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan
Agar jaya Indonesia
Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu*

MARS GERAKAN PRAMUKA

adalah lagu Jayalah Pramuka ciptaan Munatsir Amin, syair lagunya berbunyi:

*Gerakan Pramuka Praja Muda Karana
Sebagai wahana kaum muda suka berkarya
Kader pembangunan sebagai perekat bangsa
Disiplin berani dan setia berakhlak mulia
Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang
Satu pramuka untuk satu Indonesia
Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa
Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia*



PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2019-2024

VISI dalam Rencana Strategis adalah turunan dan penjabaran lima tahunan dari visi dalam Arah Kebijakan Gerakan Pramuka 2014-2045 yaitu GERAKAN PRAMUKA WADAH UTAMA PEMBENTUKAN KADER PEMIMPIN BANGSA. Dalam rangka mendapatkan kader-kader pemimpin bangsa dari kalangan Pramuka dengan kualifikasi berkarakter, berkecakapan, bela negara, dan berkerelawanan sebagaimana yang telah diterakan dalam Satya dan Darma Pramuka, maka diperlukan sub-visi atau visi turunan yang mendukung tercapainya Arah Kebijakan Gerakan Pramuka tersebut.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berjalur pendidikan nonformal, Gerakan Pramuka akan fokus memaksimalkan kedudukan tersebut dan menjadikannya sebagai wahana untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Untuk itu visi lima tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut:

**“Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda
agar berkarakter dan berkecakapan hidup”**

MISI dalam Rencana Strategis adalah tugas seumur hidup sebagai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau keputusan-keputusan organisasional, atau kemauan publik yang idealis, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan agar seorang individu dan kelompok atau organisasi tetap diakui keberadaan dan kegunaannya bagi realitas pada umumnya.

Misi harus tunduk dan mengabdikan kepada visi di atas, agar visi itu tercapai dan terwujud dalam alam kenyataan. Misi dan pelaksanaan misi harus dilakukan apapun keadaan yang dihadapi dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor agar efektif.

1. Mewujudkan sistem keorganisasian dan pengelolaan Gerakan Pramuka yang menyeimbangkan volunterisme dan profesionalisme, modern, dan melayani seluruh pemangku kepentingan Gerakan Pramuka.
2. Mewujudkan sistem dan tatalaksana pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis bangsa, menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas sesuai Satya dan Darma Pramuka, dan menjadi pilihan utama kaum muda Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya.
3. Mewujudkan kapasitas keuangan, usaha, dan aset Gerakan Pramuka yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memiliki kemandirian minimum bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka.
4. Mewujudkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara maksimal melalui pendekatan informatika, komunikasi publik dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan.

Misi diterjemahkan ke dalam agenda-agenda pokok atau program prioritas sebagai instrumen pelaksanaan suatu misi dan pencapaian sebuah visi.

Program prioritas ditetapkan dengan sangat ketat, relevan, dan yang benar-benar dinyatakan sebagai suatu kebutuhan strategis organisasi. Dengan mempertimbangkan analisis objektif, regulasi, dan kehendak tertinggi dari para pemangku kepentingan Gerakan Pramuka, maka program prioritas ditetapkan sedemikian rupa sebagai patokan pelaksanaan program lanjutan yang lebih rinci.

TUJUH PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas adalah agenda pokok, program basic yang paling diutamakan untuk dilaksanakan segera karena tuntutan kebutuhan strategis organisasi. Program prioritas merupakan alat ukur kunci dalam menilai keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi yang mustahil untuk diabaikan.

Tujuh program prioritas akan dipertajam dengan sasaran/target yang aplikabel.

Program Prioritas 1

Menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan kaum muda, serta mampu menjawab tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

Program Prioritas 2

Menjadikan anggota dewasa sebagai teladan kunci bagi kaum muda dan para pemangku kepentingan Gerakan Pramuka melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, dan sebaran yang proporsional di seluruh Indonesia.

Program Prioritas 3

Mewujudkan perencanaan, pengembangan, dan pengerjasamaan program yang berkualitas, sistematis, partisipatif, dan terkendali.

Program Prioritas 4

Meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan, organisasi, dan kepenyelenggaraan pada semua tingkatan dan instansi terkait.

Program Prioritas 5

Mewujudkan kemandirian finansial minimum dengan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang wajib, produktif, dan berkelanjutan serta menegakkan tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas.

Program Prioritas 6

Membangun citra positif Gerakan Pramuka dengan mewujudkan kapasitas informatika, integritas dan kompetensi komunikasi publik di era digital.

Program Prioritas 7

Menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang kuat, terpercaya, dan massif sebagai bukti positif keberadaan Gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan memperhatikan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), Visi dan Misi, serta Tujuh Program Prioritas yang dijadikan sebagai Rencana Strategis Gerakan Pramuka 2019-2024, ditetapkan 10 (sepuluh) strategi dasar perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pencapaian rencana tersebut, yaitu:

1. Strategi Inovasi, Ideologisasi, dan Kaderisasi:
Strategi ini diarahkan kepada peserta didik/anggota muda agar militansinya tumbuh kuat dan siap dididik menjadi calon pemimpin bangsa.
2. Strategi Re-orientasi dan Figurasi
Strategi ini diarahkan kepada anggota dewasa, baik yang aktif dalam pembinaan pendidikan kepramukaan maupun yang karena posisi publiknya aktif sebagai pengurus Kwartir Gerakan Pramuka.
3. Strategi Penguasaan Data
Strategi ini diarahkan terutama bagi pembuat keputusan dikalangan kepengurusan Gerakan Pramuka, terutama menyangkut data anggota, kekuatan-kekuatan fisik, hingga persepsi publik yang terukur tentang Gerakan Pramuka. Penguasaan data diperlukan sebagai cara untuk membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi pengembangan organisasi.
4. Strategi Kolaborasi
Strategi ini diarahkan kepada pengelola kegiatan kepramukaan maupun nonkegiatan kepramukaan agar membiasakan diri untuk mampu berkolaborasi secara proporsional, tidak egois-sektoral, atau semata-mata demi mencapai kejayaan pribadi. Diarahkan juga bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di luar organisasi kwartir agar berkolaborasi secara konstitusional dan berkeadilan demi tercapainya visi dan misi Gerakan Pramuka yang terkendali dan terukur.
5. Strategi Infrastruktur dan Disiplin Organisasi
Strategi ini diarahkan untuk tercapainya minimum essential force-nya Gerakan Pramuka. Strategi bertahan hidup, berketahanan, survive, dan responsif terhadap lingkungannya maupun persoalan apapun yang dihadapi. Disiplin organisasi harus ditegakkan dan menjadi tradisi yang positif.
6. Strategi Akselerasi Finansial
Strategi ini diarahkan bagi pengelola kwartir yang bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ketergantungan sepenuhnya kepada pihak eksternal, termasuk Pemerintah dalam pembiayaan kegiatan kepramukaan dalam jangka panjang tak lagi memadai karena dinamika keorganisasian yang semakin kompleks.

Strategi ini juga diarahkan pada percepatan pendanaan melalui optimalisasi aset yang dilakukan dengan benar, transparan, dan tidak merugikan Gerakan Pramuka, serta usaha-usaha komersial atas hak kekayaan intelektual yang dilakukan dengan legal, transparan, dan berkeadilan.

7. Strategi Komunikasi dan Apresiasi:

Strategi ini diarahkan untuk mengantisipasi arus deras informasi melalui media sosial yang melahirkan anarkisme-digital terutama dengan akun-akun anonim yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, bahkan tokoh atau badan yang bereputasi baguspun tak luput dari serangan-serangan negatif. Strategi inipun sekaligus secara aktif-positif menyampaikan konten-konten yang bermakna bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi ini menegaskan sekali lagi bahwa pentingnya komunikasi, banyak masalah yang muncul dan juga bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jujur, elegan, dan efektif. Komunikasi organisasional dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan citra positif terhadap suatu lembaga.

8. Strategi Gerakan Kerelawanan

Strategi ini diarahkan pada transformasi dari semangat kerelawanan individual menjadi gerakan kerelawanan yang melembaga, sistematis, dan bersumberdaya besar.

9. Strategi Keunggulan Internasional

Strategi ini diarahkan kepada komunitas pramuka internasional, bilateral maupun multilateral, dimana Indonesia harus berperan aktif dalam pengembangan kepramukaan sedunia. Kegiatan pendidikan kepramukaan maupun kegiatan keorganisasian dalam berbagai forum internasional harus menjadi unjuk prestasi bangsa.

10. Strategi Advokasi:

Strategi ini diarahkan kepada pihak-pihak eksternal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Secara internal, kwartir akan secara aktif melakukan upaya-upaya pembelaan hukum atas masalah hukum yang dihadapi anggotanya sejauh dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai turunan dari strategi dasar, maka dikembangkan strategi operasional agar lebih membumi.



DASA KARYA GERAKAN PRAMUKA

I. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Seiring berakhirnya Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka X Tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada tanggal 25–28 September 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara serta dengan salah satu keputusannya adalah menetapkan Kak Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso, SH. Sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023.

Semangat “Dasa Karya Gerakan Pramuka” dengan *platform* “Bangga Pramuka, Bangga Indonesia” harus digulirkan secara terus menerus dengan penuh **Komitmen, Konsekuen dan Konsisten** yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 disertai semangat Bela Negara guna menguatkan eksistensi Gerakan Pramuka yang handal dan sebagai pilihan generasi muda Indonesia khususnya di era globalisasi saat ini sesuai perkembangan ‘Masa hidup’ mereka menghadapi revolusi industri 4.0.

Kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masabakti 2018-2023 memiliki Visi: Mewujudkan anggota Gerakan Pramuka yang relevan sesuai kebutuhan zaman mereka untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi dalam kehidupannya dengan Misi: Mengarahkan dan menjadikan kaum muda ‘*agent of change*’ (pelopor pembaharu) yang lebih inovatif, relevan, dan berguna bagi bangsa, Negara, masyarakat Indonesia sesuai marwah Gerakan Pramuka yang berkarakter, berkebangsaan dan memiliki kecakapan hidup.

Oleh karenanya, amanat Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 berupa Rencana Stategik Gerakan Pramuka 2019–2024 harus di laksanakan serta di realisasikan dalam program-program yang berkesinambungan sesuai tuntutan perubahan masa kini dan tantangan kedepan bagi Gerakan Pramuka dengan

tetap memperhatikan kebijakan program kepengurusan Kwartir Nasional sebelumnya serta WOSM (*World Organization of Scout Movement*) *Vision 2020*, dan APR (*Asia Pasific Region*) *Vision 2023*.

“Dasa Karya Gerakan Pramuka 2018–2023” hadir sebagai solusi yang tepat dalam rangka me-revitalisasi Gerakan Pramuka serta lebih mendorong pendidikan kepramukaan yang lebih berdayaguna dan penuh manfaat.

II. DASA KARYA GERAKAN PRAMUKA 2018–2023

1. Penguatan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Pengembangan Pusdiklat dan Puslitbang
3. Penguatan Kehumasan
4. Pelaksanaan Sentra Perkemahan Modern
5. Manajemen Aset Gerakan Pramuka yang lebih baik dan Mandiri secara finansial.
6. Pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan Sesosif (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik).
7. Pramuka yang Kreatif dan Inovatif.
8. Pramuka Wirausaha.
9. Pramuka Bermasyarakat.
10. Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.

Dasa Karya Gerakan Pramuka diimplementasikan melalui:

Karya 1 :

Penguatan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Karya 2 :

Pengembangan Pusdik, Puslat, dan Puslitbang

Pusdik: Menghasilkan tenaga Pembina Pramuka yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan Gerakan Pramuka memasuki era Revolusi 4.0;

Puslat: Melatih keterampilan kepramukaan yang tepat guna bagi pengembangan diri dan orang lain;

Puslitbang: Menghasilkan berbagai pemikiran dan pola Gerakan Pramuka yang sesuai dengan tantangan zaman era revolusi industri 4.0, *Benchmarking* dengan gerakan.

Karya 3 :
Penguatan Kehumasan

Seluruh Sumber Daya Pramuka, membangun jejaring komunikasi, seluruh *stakeholders* Pramuka di tingkat Nasional dan Internasional, persaudaraan universal.

Karya 4 :
Sentra Perkemahan Modern

Mengembangkan Bumi Perkemahan untuk menjadi Sentra Perkemahan Terintegrasi (SPT). Gerakan Pramuka memiliki Bumi Perkemahan tersebar yang layak dan mampu menjadi pendamping Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta dengan target minimal 5 (lima) SPT di 5 Pulau besar Indonesia di tahun 2018-2023.

Karya 5 :
Manajemen Aset Yang Baik dan Mandiri Secara Finansial

Melakukan manajemen aset yang profesional dan akuntabel untuk seluruh aset yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka, menyelenggarakan program pencarian dana yang mandiri/*Independent Fundraising*, program bagi Gerakan Pramuka dimulai dari Gugusdepan hingga Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merencanakan dana abadi/*Endowment Fund*. Mengikutsertakan kalangan industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata, Membentuk program kemitraan dalam pengembangan Sumber Daya Produksi dengan memanfaatkan potensi alam disekitarnya.

Karya 6 :
Pramuka Agen Perubahan yang SESOSIF

Membangun nilai-nilai dasar Kepramukaan SESOSIF (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik) sesuai Prinsip-prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan; Menumbuhkan Pramuka sebagai sosok yang mandiri, berkarakter, berwawasan, dan siap mengambil peran strategis; Sertifikat Kepramukaan harus terdaftar secara resmi di instansi Pendidikan dan Ketenaga Kerjaan Nasional.

Karya 7 :
Pramuka Yang Inovatif dan Kreatif

Membangun pramuka yang sarat inovasi dan kreasi serta mampu mencerdaskan seluruh stakeholders; Membangun program kreatif yang bermuara pada peningkatan kapasitas individu; Memicu

semangat ekonomi kreatif; Bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif/Bekraf.

Karya 8 :

Pramuka Wirausaha

Pramuka akan menjadi penggerak Kewirausahaan berbasis komunitas, melalui **One Stop Service** (Wirausaha Pramuka) yang dikemas dalam kegiatan nyata.

Karya 9 :

Pramuka yang Bermasyarakat

Gerakan Pramuka harus mampu mendukung pemanfaatan Sumber Daya Alam sebaik mungkin; Gerakan Pramuka harus memperkuat Ketahanan Pangan; Gerakan Pramuka harus menghidupkan sentra ekonomi masyarakat kecil; Gerakan Pramuka harus mampu menjaga dan memperbaiki Lingkungan Hidup.

Karya 10:

Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global

Mengembangkan peran aktif Gerakan Pramuka di Dunia Kepanduan Internasional; Gerakan Pramuka Indonesia harus berusaha tampil terdepan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa di mata Internasional; Gerakan Pramuka harus tampil optimal baik ditingkat ASEAN, Asia-Pasifik, dan Internasional yang mampu menempatkan wakil-wakil terbaiknya duduk di jajaran Komisioner Kepanduan ASEAN, Asia-Pasifik dan Dunia; Mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah Jambore Asia-Pasifik, Jambore Dunia, maupun konferensi Kepanduan Asia-Pasifik dan Dunia.

III. ANALISA POSTUR GERAKAN PRAMUKA 2018–2023

1. Kekuatan

- a. Anggota Gerakan Pramuka merupakan anggota Kepanduan terbesar di dunia dengan jumlah anggota 25.000.000 merupakan potensi besar dan memiliki posisi tawar yang kuat di kancah Nasional dan Internasional.
- b. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Gerakan Pramuka yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

- c. Sumber daya dan potensi anggota Gerakan Pramuka yang signifikan berpotensi mendukung dan membantu Pemerintah dalam mencapai Pembangunan Nasional.
- d. Jumlah purna pengurus Gerakan Pramuka yang memiliki posisi-posisi strategis di jajaran Pemerintahan dan swasta berpotensi mendukung kebijakan dan program pembinaan di Gerakan Pramuka.
- e. Tujuan Pendidikan Kepramukaan selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional.
- f. Gerakan Pramuka selalu hadir dalam setiap pembangunan Bangsa dan Negara.

2. Kelemahan

- a. Gerakan Pramuka, terutama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masih belum cukup mandiri dalam dukungan penganggaran Program Kepramukaan.
- b. Pencapaian Rencana Strategik Gerakan Pramuka yang belum terukur dan terarah.
- c. Program pembinaan dan kegiatan yang belum terukur dan sesuai standar.
- d. Iuran anggota Gerakan Pramuka kepada WOSM yang terkesan memberatkan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- e. Belum terdapatnya mekanisme pertemuan rutin antara Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- f. Arah pembinaan di Gerakan Pramuka yang belum sesuai dengan pencapaian SDG's
- g. Perlindungan hukum terhadap aset dan kekayaan intelektual Gerakan Pramuka.
- h. Pembinaan Staf (Profesional Scout) yang belum maksimal.
- i. Susunan Kepengurusan Gerakan Pramuka (Kwartir Nasional) yang menyerupai struktur birokrasi Pemerintahan.
- j. Pelaksanaan rapat Andalan yang lebih membahas kebijakan Kwartir Nasional daripada program pembinaan.
- k. Kewirausahaan dan kemandirian yang belum berjalan.
- l. Jumlah Staf Kwartir Nasional yang terlalu banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan.

3. Peluang

- a. Bonus Demografi dimulai dari periode 2018–2023.
- b. Memanfaatkan dukungan dari semua sektor baik pemerintahan maupun swasta, sebagai sumber daya bagi Gerakan Pramuka.
- c. Kerjasama yang komprehensif dengan berbagai institusi dan instansi.

4. Tantangan

- a. Pemanfaatan Bonus Demografi.
- b. Memanfaatkan jumlah anggota Gerakan Pramuka yang besar.
- c. Kerjasama Nasional dan Internasional.
- d. Penempatan Wakil-wakil Gerakan Pramuka Indonesia di tingkat Regional (*Asia Pasific Region*).
- e. Pemanfaatan aset yang dimiliki Gerakan Pramuka.
- f. Revitalisasi Gerakan Pramuka secara menyeluruh.

IV. USULAN MODEL PERUBAHAN BAGI KEPENGURUSAN KWARTIR NASIONAL

Berdasarkan analisa yang didapat, maka dirasa perlu untuk menerapkan konsep “Dasa Karya Gerakan Pramuka” sebagai model perubahan bagi Gerakan Pramuka, khususnya dimulai dari kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018–2023 yang telah digagas oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka terpilih Kak Budi Waseso yang mempunyai sasaran Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019–2024.

Adapun penentuan kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan oleh Tim Formatur sesuai amanat Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 dengan selayaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah bentuk dan sistem kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang lama dengan model Pola Komisi dan Sub Komisi sesuai prasyarat WOSM (*World Organization of Scout Movement*). Setiap Komisi berisikan Andalan Kwartir Nasional yang anggotanya secara koefisien sesuai dengan bidangnya dan kompeten.

Hal ini dipandang perlu agar mekanisme pendelegasian dan pembagian tugasnya dapat memudahkan pelaksanaan program-program Gerakan Pramuka.

Adapun usulan komisi-komisi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai berikut:

- a. Komisi Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Komisi Pembinaan Anggota Muda;
- c. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa;
- d. Komisi Organisasi dan Hukum;
- e. Komisi Aset dan Usaha;
- f. Komisi Kerjasama Dalam Negeri;
- g. Komisi Kerjasama Luar Negeri;
- h. Komisi Kehumasan dan Informatika;
- i. Komisi Pengabdian Masyarakat;
- j. Komisi Saka, Sako, dan Gusdarma; dan
- k. Komisi Bela Negara.

Di setiap Komisi dibantu oleh Staf Kwartir Nasional (*Professional Scout*).

2. Peran pembagian tugas Andalan di setiap Komisi harus lebih optimal dengan penyelenggaraan pertemuan pembahasan/rapat lebih intensif secara berkala dan terencana dengan baik serta bertanggungjawab penuh kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
3. Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka harus dapat merencanakan skala prioritas dalam perencanaan program pembinaan yang dibuat sesuai Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019–2024 (a. Pencapaian Peserta Didik; b. Pencapaian Anggota Dewasa; c. Perencanaan dan Kerjasama, d. Organisasi, Hukum, Administrasi, Sekretariat; e. Tata kelola Usaha dan Aset Gerakan Pramuka; f. Informasi dan Komunikasi, g. Pramuka Peduli) dengan konsep “Dasa Karya Pramuka”.
4. Mensinergikan antara tujuan tugas Pemerintah dan Gerakan Pramuka, hal tersebut dapat dimulai dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Pemerintah khususnya Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
5. Meningkatkan Usaha dana bagi Gerakan Pramuka, dengan me-reviu serta meningkatkan aset dan Badan Usaha Milik Gerakan Pramuka secara profesional dan akuntabel untuk

menuju Kwartir Nasional yang mandiri (meningkatkan Bumi Perkemahan yang terpadu, koperasi, dan wirausaha di Gerakan Pramuka)

6. Pembinaan bagi peserta didik dan orang dewasa Gerakan Pramuka harus lebih terarah dan terpadu sesuai dengan pencapaian program yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dimulai dari pengembangan Pusdik, Puslat, dan Puslitbang.
7. Perlunya disusun arah dan tujuan pendidikan dan pengembangan Gerakan Pramuka dalam bentuk buku panduan sesuai dengan Dasa Karya Gerakan Pramuka hingga ke Gugusdepan.
8. Me-reviu Petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka.
9. Memunculkan kebanggaan bagi Gerakan Pramuka dengan menyusun langkah-langkah strategis sesuai kebutuhan zaman (Citra Gerakan Pramuka, *Brand Image*, Profil Gerakan Pramuka).
10. Menyusun pola Data Base Gerakan Pramuka dalam memudahkan sistem *recruitment* keanggotaan/Kartu Tanda Anggota Pramuka, iuran Gerakan Pramuka, Akreditasi Gugusdepan, Akreditasi Pusdiklat, sistem Penghargaan dan lain-lain.
11. Peningkatan kualitas Peserta Didik dan Orang Dewasa Gerakan Pramuka dengan menyelaraskan serta menguatkan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, Standar Pendidikan dan Pelatihan, serta peningkatan *lifeskil* (keterampilan hidup) yang berbasis standar kompetensi, kerjasama dengan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan dan lain-lain.
12. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi dan instansi baik Nasional dan Internasional.
13. Peilibatan Anggota Muda Gerakan Pramuka dalam setiap pelaksanaan penyusunan kebijakan-kebijakan.
14. Meningkatkan fungsi Kehumasan dalam Gerakan Pramuka.



SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PEMBIMBING NASIONAL GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI 2018-2023

- | | |
|---|---------------|
| 1. Presiden Republik Indonesia | - Ketua |
| 2. Wakil Presiden Republik Indonesia | - Wakil Ketua |
| 3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | - Wakil Ketua |
| 4. Menko Perekonomian | - Wakil Ketua |
| 5. Menko Politik Hukum dan Keamanan | - Wakil Ketua |
| 6. Menko Kemaritiman | - Wakil Ketua |
| 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia | - Wakil Ketua |
| 8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia | - Wakil Ketua |
| 9. Menteri Pemuda dan Olahraga | - Sekretaris |

Bidang Perencanaan dan Pengembangan:

1. Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas
2. Menteri Ristek dan Dikti
3. Kepala LIPI

Bidang Pembinaan Anggota Muda, Anggota Dewasa, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, dan Gugus Darma Pramuka:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Agama
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Lingkungan Hidup
8. Menteri Pariwisata
9. Kepala BKKBN
10. Kepala Staf Angkatan Darat
11. Kepala Staf Angkatan Laut

12. Kepala Staf Angkatan Udara
13. Danjen Kopasus
14. Kabaharkam Polri
15. Kadispotmar
16. Kalemdikpol
17. Kakodiklat TNI
18. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Bidang Organisasi dan Hukum:

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Menteri PAN dan RB
3. Kejaksaan Agung
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi

Bidang Aset dan Usaha:

1. Menteri PU dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Perindustrian
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Koperasi dan UMKM
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bidang Kerjasama Dalam Negeri:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Menteri Sekretaris Kabinet

Bidang Kerjasama Luar Negeri:

1. Menteri Luar Negeri

Bidang Kehumasan dan Informatika:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Bidang Pengabdian Masyarakat:

1. Menteri PDT dan Transmigrasi
2. Menteri Sosial
3. Kepala Basarnas
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bidang Bela Negara:

1. Panglima TNI
2. Menteri Pertahanan
3. Gubernur Lemhanas
4. Sekjen Dewan Ketahanan Nasional

Bidang Pengawasan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah

Susunan Dewan Penasihat Nasional Gerakan Pramuka:

1. Prof. Dr. B.J. Habibie
2. Megawati Soekarno Putri
3. Susilo Bambang Yudhoyono
4. Sri Sultan Hamengku Buwono X
5. Try Sutrisno
6. KH. Mustofa Bisri
7. Prof. Dr. KH. Syafi'i Maarif
8. Siti Hartati Murdaya
9. Frans Magnis Suseno
10. Soekarwo
11. Wisnutama
12. Harry Tanoe Sudibdjo
13. Jaya Suprana
14. Slamet Raharjo
15. Eka Cipta Wijaya
16. Nadiem Makarim



**SUSUNAN PENGURUS
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
MASA BAKTI 2018-2023**

Ketua

Komjen Pol (Purn) Drs. H. Budi Waseso

Wakil Ketua/Ketua Komisi:

- 1. Perencanaan & Pengembangan**
Prof. Dr. Jana T. Anggadiredja, Ms, Apt
- 2. Pembinaan Anggota Muda**
Supriyadi
- 3. Pembinaan Anggota Dewasa**
Prof. Dr. Suyatno, M.Pd
- 4. Organisasi dan Hukum**
Dr. Chairul Huda, SH, MH
- 5. Aset dan Usaha**
Yulius, ST
- 6. Kerjasama Dalam Negeri**
H. Dede Yusuf M. Effendi, ST, M.Ipol
- 7. Kerjasama Luar Negeri**
Drs. Ahmad Rusdi
- 8. Kehumasan dan Informatika**
Berthold DH. Sinaulan, SS
- 9. Pengabdian Masyarakat**
GKR Mangkubumi
- 10. Saka, Sako, dan Gusdarma**
Laksamana Muda TNI (Purn) Kingkin Suroso, SE
- 11. Bela Negara**
Brigjen TNI Hasto Pratisto Yuwono, S.IP
- 12. Sekretaris Jenderal**
Mayjen TNI (Pur) Dr. Bachtiar, S.IP, M.AP
- 13. Bendahara**
Afan A. Nugroho, SE

Ketua/Sekretaris/Anggota Komisi:

1. Komisi Perencanaan dan Pengembangan:

- Ketua : 1. Prof. Dr. Jana T. Anggadiredja, Ms, Apt
Sekretaris : 2. Drs. Fachrully F. Lasahido
Anggota : 3. Drs. Triadi Parmana Suparta, MBA
4. Dr. H. Rahmansyah, M.Si
5. Abdul Latif, SKM
6. Drs. Hernowo, MM
7. Kepala Puslitbangnas (*ex-officio*)

2. Komisi Pembinaan Anggota Muda:

- Ketua : 1. Supriyadi
Sekretaris : 2. Moh. Roem, S.Si
Anggota : 3. Rio Ashadi
4. Jainuddin Ladansa
5. Yevi Rivaldi, SH
6. Amrosius Buhoy
7. Yudha Adhyaksa
8. Ketua DKN (*ex-officio*)
9. Wakil Ketua DKN (*ex-officio*)

3. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa:

- Ketua : 1. Prof. Dr. Suyatno, M.Pd
Sekretaris : 2. Topari, S.Sos, M.Si
Anggota : 3. Ir. Handry R.D. Amanupunyo, MP
4. Neny Rahmawati, M.Pd
5. Hj. Sunarty S, M.Pd
6. Riyadi Santoso, S.Pd
7. Seno Novianto
8. Dr. Hj. Sri Nurhayati, M.Si
9. Kepala Pusdiklatnas (*ex-officio*)

4. Komisi Organisasi dan Hukum:

- Ketua : 1. Dr. Chairul Huda, SH, MH
Sekretaris : 2. Engkus Sutisna, ST, MT
Anggota : 3. Ir. D. Adi Pamungkas, SE, MM
4. Dr. Sari Murti, SH, MH
5. Dr. Muh Hasrul, SH, MH
6. A. Agus Ridallah, SH, MH
7. Parulian Siagian, SH, M.Hum
8. Alwis, S.Ag

5. Komisi Aset dan Usaha:

- Ketua : 1. Yulius, ST
Sekretaris : 2. Rapin Mudiardjo, SH, S.Kom, Accs
Anggota : 3. dr. Fairus Aziz Pulungan, MARS
4. Arief Sucahyo Wahyutomo
5. Kristhina R.I. Luluporo, SP, M.AP
6. Rachmad Junizar
7. Drs. H. Cepi Safrul Alam, M.Si.

6. Komisi Kerjasama Dalam Negeri:

- Ketua : 1. H. Dede Yusuf M. Effendi, ST, M.Ipol
Sekretaris : 2. Drs. Djoko Adi Walujo, ST, MM, DBA
Anggota : 3. Dr. H. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si
4. Dedi Wibowo, SE, MM
5. M.A Hailuki, S.Ip, M.Si
6. Ir. Wahyudi Manaff

7. Komisi Kerjasama Luar Negeri:

- Ketua : 1. Drs. Ahmad Rusdi
Sekretaris : 2. M. Laiyin Nento
Anggota : 3. Brata Tryana Hardjosubroto
4. Dra. Hendra Henny Andries
5. Dr. Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc

8. Komisi Kehumasan dan Informatika:

- Ketua : 1. Berthold DH. Sinaulan, SS
Sekretaris : 2. R. Andi Widjanarko
Anggota : 3. Fitri Hariyadiningsih, SS
4. Drs. Untung Widyanto, M.Si
5. Widhya Sukma
6. Kapusinfo (*ex-officio*)

9. Komisi Pengabdian Masyarakat:

- Ketua : 1. GKR Mangkubumi
Sekretaris : 2. H. Irawan Laliassa, SE, M.Si
Anggota : 3. Ir. Bayu Tresna
4. Bambang Sasongko Mulyo Kopertanta
5. Rangga Wisnu
6. Dr. Saul Ronald Jacob Saleky, SE, M.Si
7. Kurnia Baktita
8. Sony Prima Sonjaya

10. Komisi Saka, Sako, dan Gusdarma:

- Ketua : 1. Laksamana Muda TNI (Purn) Kingkin Suroso, SE
Sekretaris : 2. Dr. Sukro Muhab, M.Si
Anggota : 3. Syarifah Alawiyah, SE, MM
4. Gunawan Suswantoro, SH. M.Si
5. Ir. Frans Johanis Papilaya, M.Si
6. Dr. Muzakir Tawil, M.Si
7. Rts. Ledyanita, SPt, M.Si
8. Ketua Pinsaka Nasional (*ex-officio* 11 Kapinsaka)
a. Ketua Pinsaka Wanabakti Tingkat Nasional
b. Ketua Pinsaka Bahari Tingkat Nasional
c. Ketua Pinsaka Dirgantara Tingkat Nasional
d. Ketua Pinsaka Bhayangkara Tingkat Nasional
e. Ketua Pinsaka Bakti Husada Tingkat Nasional
f. Ketua Pinsaka Kencana Tingkat Nasional
g. Ketua Pinsaka Tarunabumi Tingkat Nasional
h. Ketua Pinsaka Wira Kartika Tingkat Nasional
i. Ketua Pinsaka Pariwisata Tingkat Nasional
j. Ketua Pinsaka Kalpataru Tingkat Nasional
k. Ketua Pinsaka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional

11. Komisi Bela Negara:

- Ketua : 1. Brigjen TNI Hasto Pratisto Yuwono, S.IP
Sekretaris : 2. Boedi Oetomo
Anggota : 3. H. Sudirman, SH, MH
4. Idris Khan, S.Sos, M.Kp
5. Kolonel Inf Sunarto, S.Sos, MAP
6. Hj. Raudatul Jannah, SKM

12. Andalan Nasional Koordinator Wilayah (Korwil)

- a. Korwil I : 1. Ir. Djufri Effendi
(Sumatera)
b. Korwil II : 2. Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP
(Jawa, Bali, NTT, NTB)
c. Korwil III : 3. Drs. HM. Hatta Zainal Abidin, M.Si
(Sulawesi, Kalimantan)
d. Korwil IV : 4. Drs. Frans W.W Fimbay, MM
(Papua, Papua Barat,
Maluku, Maluku Utara)

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
MASA BAKTI 2018-2023**

1. Ketua : H. Suriyadi MS, S.Sos, MSi
Kwarda Kalimantan Barat
2. Sekretaris : Haris Yasin Limpo, M.Si
Kwarda Sulawesi Selatan
3. Anggota : Pontianus Rushandono SE.Ak
Kwarda DI Yogyakarta
4. Anggota : H. AS. Budiando, SE, MM
Kwarda Jambi
5. Anggota : Drs. H.A. Madjid Husen, MM
Kwarda Maluku Utara

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERJA NASIONAL
MASA BAKTI 2018-2023**

1. Ketua : Robby Zulpandi Sumatera Utara
2. Wakil Ketua : Sinta Ayu Lestari Jawa Barat
3. Anggota : Abdul Wahab Munthe Riau
4. Anggota : Novia Ratna Sari Kepulauan Riau
5. Anggota : Robi Firnando, SH Jambi
6. Anggota : Ayu Niarti Bengkulu
7. Anggota : Andi Kurniawan Lampung
8. Anggota : Ayu Irti Batul Qolby Banten
9. Anggota : Joshua Sampurna Banten
10. Anggota : Dina Atrasina DKI Jakarta
11. Anggota : Rizky Dwi Amanda, S.Kom Jawa Barat
12. Anggota : Vildy Zuhliz Mahreta Jawa Barat
13. Anggota : Ramadhan Subakti, S.Hut Jawa Barat
14. Anggota : Ninda Puspita Dewi Jawa Tengah
15. Anggota : Fatkhul Manan Sulawesi Tenggara
16. Anggota : Muhammad Akmal Sulawesi Selatan
17. Anggota : Ahmad Syaifullah Sulawesi Selatan
18. Anggota : Andi Saribulan, SH Sulawesi Tengah
19. Anggota : Selvyalrianti Papua



URAIAN TUGAS DAN TARGET PENCAPAIAN PENGURUS KWARNAS 2018-2023

1. Ketua Kwartir Nasional

- a. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.
- b. Bertanggungjawab kepada Presiden RI selaku Kepala Negara dan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
- c. Bertanggungjawab atas kepemimpinan dan manajemen umum Gerakan Pramuka.
- d. Memimpin Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- e. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional.
- f. Menetapkan kebijakan umum dan keputusan strategis Gerakan Pramuka.
- g. Meningkatkan dan mengembangkan hubungan dengan kementerian dan lembaga, masyarakat dan pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Mewakili Gerakan Pramuka dalam masalah hukum.

2 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Renbang

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- c. Pengembangan Puslitbang sebagai lembaga penelitian kepramukaan yang akurat dan akuntabel.
- d. Sinkronisasi Perencanaan program kerja Kwartir Nasional.
- e. Pemantauan pelaksanaan program kerja Kwartir Nasional.
- f. Pengevaluasian pelaksanaan program kerja Kwartir Nasional.
- g. Pelaksanaan kajian dinamika kepramukaan (melalui seminar, lokakarya, diseminasi).
- h. Pengembangan kreativitas dan inovasi kepramukaan.
- i. Pengolahan data dasar dan akreditasi Gugusdepan Gerakan Pramuka.

- j. Penyiapan Bahan Rakernas, Munas, dan Pertemuan yang insidental.

3 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Binamuda

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Binamuda, Binawasa, Saka, Sako, dan Gugus Darma .
- c. Pengembangan pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan sesosif.
- d. Penanaman dan penguatan disiplin dan integritas.
- e. Pengembangan pramuka kreatif dan inovatif.
- f. Pengembangan pramuka wirausaha.
- g. Pelaksanaan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan inovatif.
- h. Pelaksanaan kegiatan pramuka berkebutuhan khusus.
- i. Fasilitasi pencapaian Pramuka Garuda.

4 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Binawasa

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Binamuda, Binawasa, Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- c. Pengembangan Pusdiklat sebagai pusat keunggulan, penjamin mutu, dan pengelola pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- d. Rekrutmen dan pengembangan orang dewasa sebagai agen perubahan dengan pendidikan sesosif.
- e. Pengembangan anggota dewasa kreatif dan inovatif.
- f. Pengembangan anggota dewasa wirausaha.
- g. Pelaksanaan kegiatan anggota dewasa yang edukatif, kreatif, dan inovatif.
- h. Penanaman dan penguatan disiplin dan integritas anggota dewasa.

5 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Orgakum

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Organisasi dan Hukum.
- c. Penguatan Organisasi Gerakan Pramuka.
- d. Pemberian bantuan hukum kepada pramuka dan kwartir.
- e. Penyusunan petunjuk penyelenggaraan kepramukaan.
- f. Pemberian tanda penghargaan Gerakan Pramuka.
- g. Penyusunan naskah kerjasama dengan pihak lain baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

6 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Aset & Usaha

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Aset dan Usaha.
- c. Pengembangan sentra perkemahan terpadu.
- d. Penguatan manajemen aset dan badan usaha.
- e. Pemantauan dan pengendalian badan usaha.
- f. Penataan, pengelolaan, dan pengembangan aset.
- g. Pengembangan unit usaha baru.

7 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Kerjasama Dalam Negeri

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Kerjasama Dalam Negeri.
- c. Pengembangan pramuka berwawasan nasional dan global.
- d. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan kementerian dan lembaga.
- e. Partisipasi kegiatan yang dilaksanakan kementerian dan lembaga lain baik untuk peserta didik maupun anggota dewasa.
- f. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan pihak swasta.

8 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Kerjasama Luar Negeri

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Luar Negeri.
- c. Pengembangan pramuka berwawasan global.
- d. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan NSO dan negara lain.
- e. Partisipasi kegiatan luar negeri baik untuk peserta didik maupun anggota dewasa.
- f. Pelibatan Gerakan Pramuka terhadap organisasi kepramukaan Asean, Regional, dan Internasional.
- g. Penguatan dan pengembangan Gugusdepan RI di luar negeri.
- h. Perintisan menjadi tuan rumah jambore dunia.

9 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Kehumasan & Informatika

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Kehumasan dan Informatika.

- c. Pembentukan dan penguatan Pusat Informasi Gerakan Pramuka.
- d. Pembentukan dan penguatan museum kepramukaan.
- e. Pengembangan perpustakaan Gerakan Pramuka.
- f. Penguatan dan pengembangan publikasi Gerakan Pramuka.
- g. Penguatan Citra Gerakan Pramuka kepada masyarakat.
- h. Penguatan dan pemanfaatan media sosial.

10 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Pengabdian Masyarakat

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Pengabdian Masyarakat.
- c. Pengembangan pramuka bermasyarakat.
- d. Pengembangan pramuka peduli (bencana, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan lainnya).
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- f. Pengembangan kampung pramuka dan desa pramuka.

11 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Saka, Sako, & Gusdarma

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Binamuda, Binawasa, Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- c. Penanaman dan penguatan disiplin dan integritas anggota Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- d. Peningkatan dan pengembangan peran Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- e. Fasilitasi kerjasama dan koordinasi lintas Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- f. Fasilitasi kegiatan Saka, Sako, dan Gugus Darma.
- g. Pengkajian pembentukan Saka dan Sako baru.

12 Wakil Ketua Kwarnas/Katua Komisi Bela Negara

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis Pembimbing Nasional Bidang Bela Negara.
- c. Penanaman dan penguatan disiplin dan integritas.
- d. Peningkatan dan pengembangan bela negara bagi semua komponen Gerakan Pramuka.
- e. Pengkajian strategi bela negara melalui Gerakan Pramuka (melalui seminar, lokakarya, desiminasi).

- f. Perumusan buku saku bela negara bagi pramuka dan anggota dewasa.
- g. Pelaksanaan kegiatan bela negara.

13 Sekretaris Jenderal

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Pengelolaan koordinasi dan komunikasi antar komisi Kwartir Nasional.
- c. Pelayanan administrasi, persuratan, perkantoran, dan rumah tangga Kwartir Nasional.
- d. Pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan SDM Pengelola Kwartir Nasional.
- e. Pelayanan konsepsional dan operasional kepada Ketua Kwartir Nasional.
- f. Pelayanan protokoler Ketua Kwartir Nasional.
- g. Penghubung antar kwartir se-Indonesia.

14 Bendahara

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Pengelolaan keuangan Kwartir Nasional.
- c. Pelayanan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Kwartir Nasional.
- d. Penyusunan, perencanaan, dan penilaian anggaran pendapatan dan belanja Kwartir Nasional.
- e. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan Kwartir Nasional.
- f. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal dalam pengembangan manajemen keuangan Kwartir Nasional.

15 Andalan Nasional

- a. Untuk melaksanakan tugas Kwarnas yang demikian luasnya, maka seluruh tugas dibagi habis dan dipercayakan (diandalkan) kepada Andalan Nasional (Annas) yang menangani urusan tertentu di bawah koordinasi: Ketua Komisi sesuai dengan urusan/spesifikasi yang menjadi tanggung-jawabnya; Sekjen; atau Bendahara.
- b. Dalam menjalankan tugas bertanggung-jawab kepada Ketua Komisi terkait; Sekjen; atau Bendahara.

16 Andalan Nasional Koordinator Wilayah

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Nasional.
- b. Mengoordinasikan kepentingan dan aspirasi kwartir daerah di wilayah tugasnya untuk dikomunikasikan kepada Kwartir Nasional.
- c. Penghubung dan fasilitator dalam penyelenggaraan program kegiatan.

17 Pusdiklatnas

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional (Pusdiklatnas) merupakan bagian integral dari Kwartir Nasional sebagai satuan pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna mengembangkan sumber daya manusia Gerakan Pramuka.
- b. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan meliputi pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan pelatihan keterampilan.
- c. Pusdiklatnas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwarnas dan secara *ex-officio* berkedudukan sebagai Andalan Nasional.
- d. Kepala Pusdiklatnas dijabat oleh seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan kepramukaan, berstatus sebagai Pelatih Pembina Mahir yang telah lulus KPL atau yang setara.
- e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.

18 Puslitbangnas

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka tingkat Nasional (Puslitbangnas) merupakan bagian integral dari Kwartir Nasional, berfungsi sebagai wadah pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- b. Puslitbangnas dipimpin oleh seorang kepala (anggota dewasa Gerakan Pramuka) yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwarnas, dan secara *ex-officio* berkedudukan sebagai Andalan Nasional.
- c. Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.

19 Dewan Kerja Nasional (DKN)

- a. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Nasional (DKN) adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka

dan bangsa yang diberikan kewenangan dan kepercayaan membantu Kwarnas dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.

- b. DKN mempunyai fungsi:
 - 1) Mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan manajemen DKN dan jajarannya.
 - 2) Berpartisipasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, khususnya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan biro terkait dan/atau yang menangani urusan kepramukaan.
 - 4) Melaksanakan manajemen dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di bawah koordinasi ketua komisi terkait.
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan organisasi kepemudaan yang setara.
- c. Ketua dan Wakil Ketua DKN secara *ex-officio* berkedudukan sebagai Andalan Nasional Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua dan Wakil Ketua DKN bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.

20 Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional (Pinsakanas)

- a. Pinsakanas merupakan bagian integral dari Kwartir Nasional.
- b. Pinsakanas mempunyai fungsi:
 - 1) Menyusun kebijakan pengelolaan saka.
 - 2) Perencana & penyelenggara pembinaan saka.
 - 3) Menjadi penghubung dan fasilitator dalam penyelenggaraan program kegiatan khususnya saka dan instansi/institusi pendukungnya.
 - 4) Dalam pelaksanaan pembinaan saka, berkoordinasi dengan Dewan Kerja Nasional.
- c. Ketua Pinsakanas, secara *ex-officio* berkedudukan sebagai Andalan Nasional.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua Pinsakanas bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.

21 Pusat informasi (Pusinfo) Kwarnas

- a. Pusinfo Kwarnas merupakan bagian integral dari Kwarnas berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.
- b. Kepala Pusinfo Kwarnas adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwarnas.
- c. Kepala Pusinfo Kwarnas bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.

22 Badan Usaha Kwarnas

- a. Badan Usaha Kwarnas Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari Kwarnas dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- b. Kepala Badan Usaha Kwarnas Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka atau dari kalangan profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwarnas.
- c. Kepala Badan Usaha Kwarnas Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas.
- d. Badan Usaha Kwarnas Gerakan Pramuka terdiri dari unit-unit usaha yang bersifat otonom.

23 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Kwarnas

Sekretaris Pelaksana

- a. Sekretaris Pelaksana (Seslak) adalah unsur staf (*profesional scouter/staf*) yang membantu Sekjen dalam mengelola dukungan staf terhadap kelancaran dan pencapaian sasaran kegiatan Kwarnas.
- b. Seslak mempunyai fungsi:
 - 1) Mengoordinir, menyelia dan mengendalikan pembinaan administrasi dan manajemen staf di lingkungan Kwarnas.
 - 2) Mengoordinir dukungan staf bagi kelancaran pelaksanaan tugas Sekjen.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung-jawab kepada Sekjen.

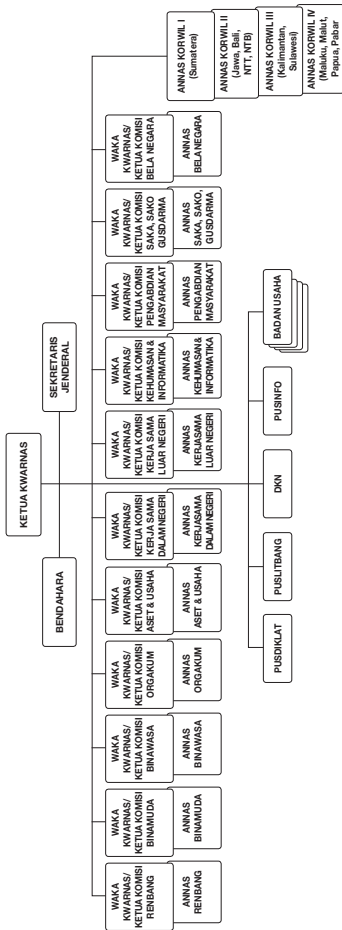
Biro

- a. Biro dipimpin oleh Kepala Biro (Karo) adalah unsur staf yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Komisi yang bersangkutan, Sekjen, atau Bendahara sesuai bidang tugasnya.
- b. Pembinaan teknis Karo berada di bawah koordinasi Ketua Komisi yang bersangkutan, Sekjen, atau Bendahara, sedangkan pembinaan administratif berada di bawah koordinasi Sekjen, dan koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Seslak.
- c. Karo bertanggungjawab secara teknis kepada Ketua Komisi yang bersangkutan, Sekjen atau Bendahara sesuai bidang tugasnya, sedangkan secara administratif seluruh Karo bertanggung-jawab kepada Sekjen.

Bagian

- a. Guna mendukung pelaksanaan tugas, Karo dibantu oleh bagian-bagian yang secara spesifik mendukung tugas dan tanggungjawab Biro. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag).
- b. Pembinaan teknis Kabag berada di bawah koordinasi Karo dan secara langsung oleh Ketua Komisi yang bersangkutan, Sekjen, atau Bendahara, sedangkan pembinaan administratif berada di bawah koordinasi Sekjen dan Karo yang bersangkutan.
- c. Kabag bertanggungjawab secara teknis kepada Karo dan Ketua Komisi yang bersangkutan, Sekjen atau Bendahara sesuai bidang tugasnya, sedangkan secara administratif seluruh Kabag bertanggungjawab kepada Sekjen dan Karo yang bersangkutan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kabag dibantu oleh seorang kepala urusan dan/atau beberapa orang staf.

BAGAN ORGANISASI KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 2018-2023





TATA KERJA

A. Rapat-rapat

1. Rapat yang sifatnya periodik terdiri dari:
 - a. Rapat Pimpinan Kwarnas,
 - b. Rapat Paripurna Andalan Nasional,
 - c. Rapat Komisi/Bidang,
 - d. Rapat Andalan Nasional Terbatas,
 - e. Rapat Kerja Nasional,
 - f. Rapat Kerja Wilayah,
 - g. Rapat Paripurna Staf, dan
 - h. Rapat Staf Terbatas.

Disamping Rapat yang sifatnya periodik, ada rapat yang insidental, tergantung kebutuhan misalnya, Rapat Satuan Tugas, Rapat Kepanitiaan, dan sebagainya.

2. Rapat Pimpinan Kwarnas:
 - a. Rapat Pimpinan Kwarnas diselenggarakan satu kali dalam seminggu atau ditentukan kemudian.
 - b. Pimpinan Rapat adalah Ketua Kwarnas atau Waka Kwarnas yang ditunjuk mewakilinya.
 - c. Peserta Rapat adalah para Waka Kwarnas, Sekjen, dan Bendahara.
 - d. Bila dipandang perlu rapat dapat mengundang Annas atau Staf Kwarnas.
 - e. Agenda Rapat dititikberatkan pada penentuan kebijakan Kwarnas terhadap hal-hal yang penting dan mendesak.
3. Rapat Paripurna Andalan Nasional
 - a. Rapat Paripurna Andalan Nasional diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
 - b. Pimpinan Rapat adalah Ketua Kwarnas.
 - c. Peserta rapat adalah seluruh Andalan Nasional.
 - d. Agenda rapat dititikberatkan pada evaluasi, koordinasi dan penentuan kebijakan dalam menjabarkan kebijakan Kwarnas.

4. Rapat Komisi/Bidang
 - a. Rapat Komisi diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan.
 - b. Pimpinan rapat adalah Waka Kwarnas/Ketua Komisi atau anggota Komisi yang ditunjuk.
 - c. Peserta Rapat adalah Andalan Nasional komisi yang bersangkutan dan pejabat lain yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam Rapat Komisi.
 - d. Agenda rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas komisi yang bersangkutan.

5. Rapat Andalan Nasional Terbatas
 - a. Rapat Andalan Nasional Terbatas diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
 - b. Pimpinan Rapat adalah Ketua Kwarnas atau Waka Kwarnas yang ditunjuk mewakilinya.
 - c. Peserta Rapat adalah Andalan Nasional yang diperlukan.
 - d. Agenda rapat dititikberatkan pada koordinasi pelaksanaan keputusan rapat Kwarnas atau hal-hal lain yang penting dan mendesak untuk dikoordinasikan.

6. Rapat Kerja Nasional
 - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan satu kali dalam setahun.
 - b. Pimpinan Rapat adalah Ketua Kwarnas.
 - c. Peserta Rakernas adalah Pimpinan Kwarnas, Andalan Nasional, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang tertentu yang diperlukan.
 - d. Agenda Rapat dititikberatkan pada pemaparan program kerja tahun yang akan datang, laporan pelaksanaan program kerja tahun yang lampau, dan penyampaian informasi penting tentang kegiatan dan lain-lain yang dianggap perlu.

7. Rapat Kerja Wilayah
 - a. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan satu kali dalam setahun, di:
 - 1) Wilayah I meliputi Kwartir Daerah di Sumatera,
 - 2) Wilayah II meliputi Kwartir Daerah di Jawa, Bali, NTB dan NTT.

- 3) Wilayah III meliputi Kwartir Daerah di Kalimantan dan Sulawesi,
 - 4) Wilayah IV meliputi Kwartir Daerah di Maluku dan Papua.
- b. Pimpinan Rakerwil adalah Ketua Kwarnas atau unsur pimpinan yg ditunjuk
 - c. Peserta Rapat adalah Kwarda di masing-masing wilayah, Annas yang ditunjuk dan Staf Kwarnas.
8. Rapat Paripurna Staf
- a. Diselenggarakan setiap saat diperlukan.
 - b. Pimpinan Rapat Staf adalah Sekjen.
 - c. Peserta Rapat adalah Staf Kwarnas.
 - d. Agenda Rapat dititikberatkan pada koordinasi pelaksanaan tugas staf.
9. Rapat Satuan Tugas
- a. Pimpinan Rapat adalah Annas.
 - b. Peserta Rapat adalah anggota Satgas.
 - c. Agenda Rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas Satgas.
10. Rapat Panitia
- a. Pimpinan Rapat adalah Ketua Panitia atau Annas yang ditetapkan.
 - b. Peserta Rapat adalah seluruh anggota panitia.
 - c. Agenda Rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas panitia

B. Hubungan Kerja

1. Hubungan kerja dengan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas)
 - a. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka serta penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional dan internasional, Kwarnas mengadakan hubungan kerja dengan Mabinas.
 - b. Agar Mabinas dapat berperan secara nyata dan aktif, serta dapat memberikan bimbingan dan bantuan secara konseptual, efisien dan efektif, maka harus ada hubungan koordinasi dan kerjasama yang serasi dan erat antara Kwarnas dan Mabinas.

- c. Mabinas dapat berfungsi sebagai saluran hubungan timbal baik antara Kwarnas dengan Instansi Pemerintah maupun masyarakat.
2. Hubungan struktural dan fungsional Andalan Nasional dan Staf Kwarnas.
 - a. Andalan Nasional dapat mengadakan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan Staf Kwarnas secara langsung atau melalui Sekjen.
 - b. Andalan Nasional dapat mengadakan pengawasan dan memberi bimbingan serta saran dalam pelaksanaan tugas Staf Kwarnas.
 - c. Gagasan Andalan Nasional dapat disampaikan kepada Ketua Komisi yang bersangkutan atau melalui Sekjen untuk dibahas dan disusun konsepnya oleh Staf Kwarnas. Sebaliknya konsep yang disusun oleh Staf Kwarnas disampaikan kepada Sekjen untuk disempurnakan oleh Ketua Komisi/Andalan Urusan sesuai masalahnya.
 - d. Konsep, baik yang dibuat oleh Andalan Nasional maupun Staf Kwarnas, setelah dibahas dan dimatangkan, diajukan kepada Ketua Kwarnas.
 - e. Setiap tulisan, naskah, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Kwarnas ditandatangani oleh Ketua Kwarnas atau oleh unsur pimpinan yang ditunjuk atas nama Ketua Kwarnas selaku pelaksana harian Ketua Kwarnas.
 - f. Surat yang dikeluarkan oleh Kwarnas ditandatangani oleh Ketua Kwarnas atau Sekjen atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Ketua Kwarnas.
3. Hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, masyarakat dan institusi lainnya.
 - a. Untuk menunjang kegiatan kepramukaan diadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau institusi lainnya.
 - b. Hubungan kerja tersebut diatur dan dilaksanakan berdasarkan keputusan atau kesepakatan bersama antar lembaga yang bersangkutan.
4. Pembinaan hubungan kerja
 - a. Untuk membina dan memantapkan hubungan kerja dalam lingkungan Kwarnas diperlukan adanya komunikasi yang

- berkesinambungan antara Andalan Nasional dan Staf Kwarnas, sesuai dengan jiwa persaudaraan dan persatuan dalam Gerakan Pramuka.
- b. Pembinaan hubungan kerja tersebut dilakukan dengan pendekatan, baik secara fungsional maupun secara pribadi, sehingga dapat terwujud “saling asih, saling asah, dan saling asuh”.
 - c. Hubungan kerja antara Annas dan Staf maupun antar Staf harus didasari oleh budaya organisasi Gerakan Pramuka yang mengacu kepada Kode Kehormatan Pramuka
5. Otorisasi dan koordinasi tatalaksana keuangan/anggaran
- a. Pemegang otoritas tertinggi di bidang keuangan/anggaran adalah Ketua Kwarnas, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dapat secara terbatas diserahkan kepada Ketua Komisi/Sekjen/Bendahara. Batasan jumlah otorisasi anggaran yang dapat dialihkan akan ditentukan tersendiri.
 - b. Bendahara sebagai pengelola keuangan hanya dapat mengeluarkan uang sesudah ada otorisasi dari Ketua Kwarnas/Waka/Sekjen.
 - c. Staf Kwarnas yang akan mengajukan kebutuhan anggaran/keuangan terlebih dahulu mengajukan kepada Ketua Komisi/Sekjen, kemudian diajukan kepada Ketua Kwarnas untuk dimintakan persetujuannya atau langsung diteruskan kepada Bendahara dalam batas-batas wewenangnya.
 - d. Sebelum Ketua Kwarnas/Waka Kwarnas/Sekjen memberikan persetujuan atas pengajuan anggaran, perlu dikoordinasikan atau dimintakan pendapat kepada Bendahara, untuk mendapatkan kepastian tentang tersedianya dana.
 - e. Dalam jumlah tertentu dapat disediakan kas kecil untuk mendukung kebutuhan rutin sehari-hari yang jumlahnya akan ditentukan kemudian. Kas kecil dikelola oleh Karo Keuangan dan otorisasi dapat dilakukan oleh Seslak atau Karo Umum.
Ketersediaan dana di kas kecil diatur langsung oleh Bendahara.



PENUTUP

Buku Saku Kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023, dibuat guna membantu pelaksanaan tugas dalam garis besarnya saja. Hal-hal lain yang belum termuat di dalamnya dapat dipelajari pada UU 12 Tahun 2010, AD/ART, Renstra, Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka, dan hasil-hasil rapat kerja serta rapat pimpinan.

Selamat Bekerja.

Jakarta, ____ Desember 2018
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jln. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110
www.pramuka.or.id